**PENGARUH INTERNAL AUDIT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN AUDITEE
(STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI)**

*Effect On The Level Compliance Internal Audit Auditee Training and Development Agency
Supreme Court Legal and Judicial Affairs.*

**INA LESTARIANI DINITA
IRIYADI**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

ABSTRACT

And the role of the internal audit function including the important element in the control system of the organization in order to achieve organizational objectives in addition to the good quality of agency performance can be created also by cooperation with the leadership and management of the organization in an institution where the parts that have interconnections, where a set of the management agencies must have an appropriate level of compliance in obeying all the rules and regulations in force in order to achieve maximum results.

The purpose of this study is to investigate the implementation of internal audit which will affect the level of compliance of the auditee on the Training and Development Agency Kumdil Supreme Court.

This study uses primary data by questionnaire and closed questions with alternative answers are yes and no to the auditee. Methods of research used descriptive method.

The results of this study indicate that an internal audit at the Training and Development Agency Kumdil RI Supreme Court greatly affect compliance level auditee, this is caused by a systematic audit of internal processes in order to obtain and evaluate evidence objectively, in order to conduct an independent assessment of the economy and efficiency of operations, effectiveness in achieving the desired results and compliance with policies, regulations and laws, determine the correspondence between the performance achieved with previously established criteria and communicating the results to those users of the report.

Based on the description above, the outhers concluded that the efeet of the internal audit of the auditee compliance level of compliance auditor in the research and development agency legal training and judical Indonesia Republic supreme court is in comformity with professional standart of internal auditing in 2004.

Keyword: Internal Audit (SPAI 2004), Audit Compliance

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam dunia kerja banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya (Amilin dan Rosita Dewi, 2008). Tidak diragukan lagi, tingkat kompetensi dan profesionalisme harus dimiliki setiap profesi, karena dua hal tersebut adalah modal dasar bagi semua profesi untuk mendapatkan kepuasan kinerja tidak terkecuali bagi auditor dalam melaksanakan prosedur auditnya.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good government* dan *clean government*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good government* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan di pemerintahan merupakan salah satu penyebab terjadinya

ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan yang tidak atau belum siap terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi internal audit mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya audit akan memberikan tingkat keyakinan informasi yang dilaporkan mengenai hasil-hasil program atau kegiatan, demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi atau lembaga. Kegiatan audit juga akan dapat memberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintah, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah yang bersih atau *good government* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (prajogo, 2003). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam

pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan (Wilopo, 2003). Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peranan yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggungjawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2003).

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncuk kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peran dan fungsi internal audit termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit.

Pelaksanaan internal audit merupakan suatu aktivitas yang kritis dan menghendaki adanya pengungkapan (*disclosure*), yang mungkin akan dianggap sebagai ancaman oleh pihak yang kebetulan diperiksa. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena pengungkapan dan kritik sangatlah tepat dijadikan nama permainan dimana internal auditor dibatasi hanya area akuntansi dan laporan dibuat jarang sekali mengenai pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari auditor atau pengawas internal itu

Kualitas kinerja instansi yang baik dapat tercipta pula dengan adanya kerjasama manajemen dengan pimpinan serta perangkat organisasi dalam sebuah instansi dimana bagian-bagian itu memiliki saling keterkaitan, dimana seperangkat manajemen instansi harus memiliki tingkat kepatuhan yang sesuai dalam menaati semua peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku guna mencapai hasil yang maksimal.

Kepatuhan terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan sebagai salah satu tolak ukur atas penilaian stakeholder atas kinerja anggaran. Kepatuhan menjamin seluruh kegiatan tetap berada dibawah kendali manajemen dan pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja anggaran yang

bersih dan tepat sasaran. Pelaksanaan kepatuhan meliputi kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin lebih fokus pada audit kepatuhan (*compliance*), sehingga judul dalam penelitian ini adalah : **“PENGARUH INTERNAL AUDIT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN AUDITEE (STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI)”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan internal audit Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI;
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan *auditee* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI;
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh internal audit terhadap tingkat kepatuhan *auditee* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang

diperlukan, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Dalam hal ini, penulis mencoba mendapat literatur dengan memperkaya bacaan pustaka baik dari buku-buku literatur, jurnal, skripsi, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan, data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

3. Kuesioner

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan berupa formulir yang diajukan secara tertulis dan bersifat tertutup dengan alternatif jawaban ya dan tidak.

4. Interview / Wawancara

Merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis.

5. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat prosedur serta struktur organisasi yang terdapat di perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Internal Audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI

Internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dilaksanakan oleh tim khusus pemeriksa intern dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Internal audit dilakukan setiap triwulan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI antara lain : tujuan internal audit, tanggungjawab dan wewenang internal audit, program kerja internal audit, pelaksana internal audit, laporan hasil dan tindaklanjut internal audit.

Internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu meliputi audit keuangan (*financial audit*), audit kepatuhan (*compliance audit*), dan audit kinerja (*performance audit*).

Tujuan dilaksanakannya internal audit keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta penggunaan dana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Dengan harapan hasil audit atas pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara realisasi penganggaran dengan perencanaan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Ketaatan pada peraturan perundangan;
3. Keandalan sistem akuntansi/ pencatatan keuangan;
4. Kesesuaian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada peraturan perundangan;
5. Efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

Tujuan dilakukannya audit kepatuhan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI untuk meminimalisir pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Karena audit ini dapat mengungkapkan tentang adanya kepatuhan entitas terhadap regulasi sekaligus menuangkan permasalahan yang mungkin disebabkan oleh regulasi itu sendiri.

Tujuan dilakukannya audit kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI mengetahui kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.

Kegiatan internal audit di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI ini dilakukan per triwulan. Pemeriksaan internal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI ini mencakup seluruh manajemen organisasi. Pemeriksaan internal ini berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian organisasi dan kualitas program-program yang direncanakan serta realisasi pelaksanaan program serta anggaran yang terserap dalam kegiatan program tersebut. Informasi yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk dan rinciannya, tergantung pada sub bagiannya.

Dalam pelaksanaan internal audit di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pimpinan pemeriksa intern telah menetapkan tujuan, wewenang dan tanggungjawab pemeriksa intern. Pemeriksa intern bertanggungjawab atas keseluruhan kegiatan internal audit serta melaksanakan penilaian, evaluasi dan pengkajian hasil sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan, lalu memuat rencana untuk pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Pimpinan pemeriksaan intern membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis dengan maksud sebagai pedoman bagi anggota pemeriksa intern dalam melaksanakan pemeriksaannya, sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan sistematis serta tepat pada sasarannya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Tujuan dari internal audit yang dilakukan oleh pemeriksa intern adalah membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian secara objektif serta memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI memberikan gambaran bahwa satuan pengendalian intern merupakan fungsi yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Kepala Pusdiklat Teknis dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Eselon I selaku Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Sedangkan Satuan pengawas intern atau pemeriksa intern Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Sistem Pemeriksaan Pengendalian Intern yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Mahkamah Agung RI tentang pencapaian tujuan pemeriksaan dan tujuan instansi;

- c. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan Tembusan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- d. Mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan oleh bagian pemeriksa intern, untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa intern.

Internal audit dalam melakukan pemeriksaan, Kepala Pemeriksa Intern beserta anggota timnya mempunyai wewenang untuk :

- a. Setiap saat dapat memasuki untuk memeriksa seluruh bagian dilingkungan instansi, memeriksa seluruh dokumen atau catatan yang dipandang perlu yang berkaitan baik langsung dengan kegiatan instansi serta mewawancarai atau memeriksa staf yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. Apabila dipandang perlu, internal audit dapat memperoleh bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan pemeriksaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
- c. Melakukan pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Kepala Pemeriksa Intern dengan seizin Kepala Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Dengan tanggungjawab tersebut sangat memungkinkan bagi satuan pengendalian intern Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI untuk melakukan audit dengan jangkauan yang cukup luas meliputi seluruh kegiatan disetiap tingkat manajemen, termasuk seluruh staf.

Program kerja internal audit merupakan rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan hasil baik diperlukan program pemeriksaan yang lengkap, rinci dan terarah. Dengan demikian program pemeriksaan merupakan rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang objek yang diperiksa.

Adapun program kerja internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Mengevaluasi rencana program kerja divisi;
2. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pada setiap divisi;
3. Mengevaluasi efektivitas pengadaan termasuk yang mendukung dalam setiap kegiatan;
4. Mengevaluasi efektivitas setiap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh setiap divisi;
5. Mengevaluasi efektivitas laporan keuangan;

6. Mengevaluasi efektivitas penyerapan anggaran dalam setiap divisi.

Proses pelaksanaan internal audit merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh auditor internal dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses internal audit. Audit sektor publik memiliki fungsi yang luas terutama dalam kaitannya dalam tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan atau korupsi. Untuk itu perlu dilakukan adanya pemeriksaan sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Pelaksanaan internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Tahapan persiapan audit, meliputi:

1. Penyusunan program audit;
2. Pengesahan surat penugasan pemeriksaan;
3. Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang akan diperiksa;
4. Pengumuman informasi atau data mengenai aspek-aspek yang mendukung pemeriksaan.

Tahap pelaksanaan audit, meliputi : tahap pemeriksaan pendahuluan, terdiri dari :

1. Permintaan data untuk kepentingan tugas-tugas pemeriksaan;
2. Pengujian atau penilaian sistem pengendalian manajemen;
3. Pengidentifikasian temuan-temuan;
4. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan.

Tahap pemeriksaan lanjutan, terdiri dari :

1. Pengembangan temuan hasil pemeriksaan;

2. Penyempurnaan data-data pendukung untuk kertas kerja pemeriksaan;
3. Penyusunan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan;
4. Permintaan tanggapan dari pimpinan objek pemeriksaan;
5. Pembahasan dengan pimpinan objek pemeriksaan, yaitu pimpinan tertinggi unit kerja yang diperiksa

a. Tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan, meliputi :

1. Penyusunan daftar laporan hasil pemeriksaan;
2. *Review* laporan hasil pemeriksaan;
3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Penandatanganan laporan hasil pemeriksaan;
5. Pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

b. Tahap *monitoring* tindaklanjut, meliputi :

1. Pengiriman dokumen permintaan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan disertai bukti-bukti pendukung;
2. Penyusunan daftar laporan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan;
3. *Review* laporan;
4. Penyusunan laporan tindaklanjut.

Pada tahap persiapan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan *review* sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor/ pemeriksa

intern dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan dibuat untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses internal audit. Agar dalam pelaksanaan internal audit efektif dan efisien maka diperlukan adanya rencana yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa. Dalam perencanaan auditnya, pemeriksa intern harus mempertimbangkan kapan audit harus dilaksanakan dengan membuat program secara tertulis. Tanpa program yang baik, hasil audit dapat menyimpang atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Dalam persiapan perencanaan penugasan audit harus mengacu pada prinsip dan standar audit agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Ketika perencanaan penugasan audit disetujui, lembaga audit harus berusaha melaksanakannya sebaik mungkin. Tidak ada perubahan atau penyesuaian yang dibuat atas penugasan audit, kecuali jika terdapat kondisi tertentu. Penyesuaian perencanaan biasanya diperiksa dan disetujui oleh lembaga audit yang mengeluarkan perencanaan. Sebelum mengimplementasikan perencanaan audit, diperlukan tahap-tahap seperti pembentukan tim audit, melaksanakan survey audit serta menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit.

Untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan intern terlebih dahulu pemeriksa intern juga harus mengetahui informasi umum mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Mahkamah Agung RI guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern. Setelah itu, dibuat suatu perencanaan penugasan audit dimana dalam perencanaan audit mencakup keseluruhan rencana dalam penugasan audit pada masa yang akan datang. Perencanaan audit harus diserahkan kepada lembaga yang untuk mendapatkan persetujuan.

Tahap pengauditan dalam internal audit terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah efisiensi realisasi penyerapan anggaran dan telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan internal audit disusun untuk membantu auditor/pemeriksa intern dalam mencapai tujuan audit internal. *Review* hasil-hasil program akan membantu pemeriksa intern untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. *Review* efisiensi realisasi penyerapan anggaran akan mengarahkan pemeriksa intern untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan penyaluran anggaran yang benar sesuai RAB dan Standar Umum. *Review* kepatuhan akan membantu pemeriksa intern untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan dan hukum serta kebijakan intern yang ditetapkan. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama,

tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu.

Tahap pelaporan merupakan tahap dimana laporan internal audit ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian internal audit, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan yang disajikan auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.

Setelah pemeriksaan internal audit selesai dilaksanakan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pemeriksa intern akan menuangkan hasil pemeriksaanya tersebut dalam sebuah laporan. Laporan hasil audit harus memenuhi tujuan, ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Laporan audit juga harus akurat, objektif, jelas, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang, serta mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat waktu. Selain itu dibutuhkan adanya manajemen audit yang baik, sehingga pengelolaan dalam bagian internal audit dapat berjalan dengan tepat.

Hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pemeriksa intern ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dengan penetapan waktu 14 hari dari setelah pembahasan terakhir.

Tahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh pemeriksa intern sudah diimplementasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi pemeriksa intern.

Tindaklanjut (*follow up*) merupakan tahap penting untuk mengetahui pelaksanaan dari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh satuan pengawas intern. Untuk itu setelah laporan hasil pemeriksaan didistribusikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI maka objek yang diperiksa diharapkan segera melaksanakan survey tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disepakati dan tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Pimpinan objek yang diperiksa wajib membuat laporan program pelaksanaan tindaklanjut pemeriksaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan dari satuan pemeriksa intern. Laporan tindaklanjut

pemeriksaan tersebut harus disetor dengan bukti-bukti dokumen pendukungnya atas tindaklanjut yang telah dilaksanakan dan disampaikan kepada kepala pemeriksa intern. Berdasarkan laporan tindaklanjut pemeriksaan tersebut, satuan pemeriksa intern melakukan *monitoring* tindaklanjut yang dilaksanakan, serta membuat laporan hasil tindaklanjut yang ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI dan tembusan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Apabila saran-saran rekomendasi tidak dijalankan, objek pemeriksa harus menjelaskan penyebab tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut.

Apabila dalam laporan yang sudah dikeluarkan terhadap temuan yang mengandung indikasi tindak pidana dan perdata, maka tindaklanjut yang diambil atas dasar persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu melakukan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Hasil pemeriksaan khusus terhadap Divisi/Bagian/Staf yang melakukan tindak pidana atau perdata tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi yaitu tindakan administratif atau gugatan pidana atau perdata.

Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat penyelewengan yang dilakukan. Tindakan yang sering dilakukan misalnya sebagai berikut :

1. Tidak mendapat/pemotongan remunerasi/tunjangan sesuai dengan jenis penyelewengannya;
 2. Penangguhan kenaikan golongan dan jabatan;
 3. *Non job/* tidak diberikan pekerjaan/tugas.
- 2. Kepatuhan *Auditee* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI**

Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi tidak terkecuali pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.

Tujuan kepatuhan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI adalah untuk mengetahui seberapa jauh manajemen/pegawai mengikuti ketetapan atau peraturan yang telah ditetapkan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan dengan yang dikerjakan.

Auditee pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI meliputi seluruh divisi/bidang, diantaranya bidang perencanaan dan program, bidang penyelenggara, bidang keuangan, bidang umum.

Salah satu bentuk kepatuhan di bidang keuangan yang berada di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu Bendahara pengeluaran harus membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penyerapan dan realisasi anggaran setiap kegiatan dilaksanakan. Selain itu bendahara pengeluaran melaporkannya setiap bulan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Acuan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan setiap tugasnya, yaitu misalnya dalam pembuatan biaya perjalanan peserta diklat maupun biaya perjalanan dinas yaitu menggunakan standar biaya umum yang sudah ditetapkan.

Bentuk kepatuhan pada bidang perencanaan dan program yaitu dengan melaksanakan program-programnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, misalnya segera mungkin membuat surat permintaan peserta, surat keputusan penetapan peserta, surat penetapan fasilitator dan surat keputusan kepanitiaan agar tidak terlalu dekat dengan waktu penyelenggaraan. Selain itu di bidang perencanaan dan program harus teliti dalam pemilihan peserta dikhawatirkan peserta tersebut pernah mengikuti diklat dimaksud.

Sedangkan bentuk kepatuhan di bidang penyelenggara yaitu dengan melaksanakan penyelenggaraan diklat sesuai dengan yang dijadwalkan oleh bagian program, dimana acuannya setelah menerima surat keputusan yang sudah di tandatangani oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Salah satu bentuk kepatuhan di bidang umum yaitu diantaranya mengenai kehadiran para pegawai. Apabila ada pegawai yang telah masuk jam kerja lebih dari 5 menit dikenakan sanksi yaitu pemotongan remunerasi/tunjangan pegawai sebesar 10% setiap harinya dari jumlah remunerasi. Selain itu tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pembelanjaan perlengkapan kantor.

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI baru menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Penerapan sistem ini dilakukan di seluruh lingkungan Mahkamah Agung RI. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja.

Salah satu implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu setiap pegawai/staf mengisi lembar kerja masing-masing, dimana lembar kerja tersebut diisi setiap melakukan pekerjaan setiap harinya. Lembar kerja tersebut dikumpulkan setiap bulannya dan dikoreksi oleh atasan masing-masing.

Untuk dapat dikatakan telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen tersebut melainkan dengan adanya keselarasan substansi antar dokumen-dokumen tersebut yang dapat dilihat dari ada tidaknya indikator kinerja yang selaras dalam dokumen-dokumen tersebut. Adanya keselarasan indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan

Dalam penganggaran berbasis kinerja informasi kinerja merupakan media atau

sarana dalam mengaitkan pengeluaran yang akan dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerjanya. Informasi kinerja dimaksud dinyatakan dalam bentuk indikator kinerja dan target capaiannya. Karena itu, salah satu unsur penting dalam penganggaran berbasis kinerja adalah penetapan ukuran atau indikator kinerja. indikator kinerja output memegang peranan kunci dalam ketentuan mengenai akuntabilitas pemerintah yang baik dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya, perencanaan dan praktek manajemen yang lebih baik.

Apabila Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ini telah diterapkan dengan benar, maka secara langsung berdampak tingkat kepatuhan manajemen/auditee dapat terlihat. Dalam ABK telah ditetapkan target kinerja. Jika audit ketaatan tidak dilakukan hanya dengan menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggarannya, tetapi juga menilai apakah pencapaian target dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Salah satu implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yaitu setiap pegawai/staf mengisi lembar kerja masing-masing, dimana lembar kerja tersebut diisi setiap melakukan pekerjaan setiap harinya. Lembar kerja tersebut dikumpulkan setiap bulannya dan dikoreksi oleh atasan masing-masing.

Kualitas kinerja instansi yang baik dapat tercipta pula dengan adanya kerjasama manajemen dengan pimpinan serta perangkat

organisasi dalam sebuah instansi dimana bagian-bagian itu memiliki saling keterkaitan, dimana seperangkat manajemen instansi harus memiliki tingkat kepatuhan yang sesuai dalam menaati semua peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku guna mencapai hasil yang maksimal.

3. Pengaruh Internal Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Auditee* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI

Dengan adanya internal audit membantu Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI untuk mencapai tujuannya. Melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Dari tujuan internal audit tersebut serta pelaksanaan yang diterapkan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, maka dengan adanya pelaksanaan internal audit khususnya terhadap kinerja akan sangat membantu manajemen dalam menunjang pengendalian intern manajemen instansi. Sehingga dengan adanya internal audit yang baik dan telah dilaksanakan seagaimana mestinya akan membantu manajemen dalam mengatur dan mengambil keputusan yang tepat dalam mencapai tujuannya. Dan diharapkan dengan dilakukan pengawasan dan penilaian atas sistem tersebut akan lebih meningkatkan dan mendorong staf/pegawai untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaruh internal audit terhadap kepatuhan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam instansi. Hal ini disebabkan karena peran dan fungsi internal audit adalah unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi guna mencapai tujuan organisasi selain itu kualitas kinerja instansi yang baik dapat tercipta pula dengan adanya kerjasama manajemen dengan pimpinan serta perangkat organisasi dalam sebuah instansi dimana bagian-bagian itu memiliki saling keterkaitan, dimana seperangkat manajemen instansi harus memiliki tingkat kepatuhan yang sesuai dalam menaati semua peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku guna mencapai hasil yang maksimal. Selain itu internal audit tidak hanya memeriksa kebenaran catatan dan dokumen, menilai struktur dan pengendalian intern, serta mengecek terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan akan tetapi internal audit juga melakukan analisis, penilaian serta penelaahan terhadap kinerja manajemen disetiap sub bagian.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan itu, internal audit menyimpulkan temuan-temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan dalam suatu bentuk laporan yang disebut laporan hasil pemeriksaan. Dimana hasil laporan pemeriksaan ini merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keandalan pengendalian kinerja manajemen dari setiap sub bagian yang telah dibuatnya dan atas

laporan tersebut manajemen dapat mengambil keputusan untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan. Dengan demikian dapat dilaksanakan perbaikan sesuai dengan saran-saran yang diberikan pemeriksa intern sehingga dapat menunjang efektifitas pengendalian kepatuhan *auditee*.

Laporan yang memuat revisi-revisi, perbaikan-perbaikan dan rekomendasi yang disertai tindakan-tindakan perbaikan, pengendalian kepatuhan *auditee* diharapkan akan semakin memadai sehingga instansi dapat menjalankan kegiatannya/operasinya dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal audit pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan *auditee*, hal ini disebabkan oleh proses internal audit yang sistematis guna memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan setelah

membandingkan dengan teori-teori yang relevan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan internal audit Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sudah memadai dan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal 2004. Dimana internal audit dilaksanakan pemeriksa intern. Auditor internal yang independen dan kompeten serta dalam melaksanakan pemeriksaannya terlebih dahulu menetapkan tujuan internal audit, tanggungjawab wewenang internal audit, program kerja internal audit, pelaksanaan internal audit dan laporan serta tindaklanjut internal audit;
2. Tingkat kepatuhan *auditee* di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sudah memadai. Dimana penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ini telah diterapkan dengan benar, maka tingkat kepatuhan manajemen/*auditee* dapat terlihat. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. Dalam ABK telah ditetapkan target kinerja. Jika audit ketaatan tidak dilakukan hanya dengan menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggarannya, tetapi juga menilai apakah pencapaian target dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
3. Pengaruh internal audit terhadap tingkat kepatuhan *auditee* pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yaitu sangat mempengaruhi disetiap pelaksanaan kegiatan dalam instansi. Hal ini disebabkan karena peran dan fungsi internal audit adalah unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi guna mencapai tujuan organisasi selain itu kualitas kinerja instansi yang baik dapat tercipta pula dengan adanya kerjasama manajemen dengan pimpinan serta perangkat organisasi dalam sebuah instansi dimana bagian-bagian itu memiliki saling keterkaitan, dimana seperangkat manajemen instansi harus memiliki tingkat kepatuhan yang sesuai dalam menaati semua peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku guna mencapai hasil yang maksimal. Selain itu internal audit tidak hanya memeriksa kebenaran catatan dan dokumen, menilai struktur dan pengendalian intern, serta mengecek terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan akan tetapi internal audit juga melakukan analisis, penilaian serta penelaahan terhadap kinerja manajemen disetiap sub bagian

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2006. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Jilid 2. Edisi 3. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Achmad, N. and Muktiadji, N., 2005. Analisis Kecukupan Modal Kerja, Arus Kas Operasi dan Kemampulabaan dengan Menggunakan Tolok Ukur Siklus Operasi: Studi Kasus PT. Kalbe Farma Tbk. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 5(2), pp.133-139.

- Amilin dan Rosita Dewi. 2008. Skripsi. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik dengan *Role Stress* sebagai Variabel Moderating. *Jurnal akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol.11. No.1 Juni.
- Arens A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2010. *Audit And Assurance Service: An Integrated Approach*.
- Arens. Elder dan Beasley. Auditing Pendekatan Terpadu. Diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf. 2011. Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Carlin Tyrone M. 2004. *Output Based-Budgeting and Management of Performance*. MGSM Working Papers in Management. Macquarie Graduate School of Management. Sydney.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) dikutip oleh William F. Messier, Jr 2003.
- Djanegara, H., 2004. Evaluasi Metode Penilaian Persediaan Kaitannya Dengan Harga Pokok Penjualan. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 4(1).
- Djanegara, H.M.S., 2005. Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan: Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 5(1), pp.1-6.
- Djanegara, H.M.S., Triandi, T. and Praktikno, S., 2009. Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Pembelian pada PT. Organ Jaya. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 9(1), pp.1-8.
- Effendy, M., Hidayat, L. and Sumardimansyah, A., 2014. PENGARUH HUTANG JANGKA PANJANG TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 2(3).
- Hidayat, L. and Widijawati, E., 2007. Analisis Investasi Pengembangan dalam Hubungannya dengan Tingkat Pengembalian, Risiko, dan Sumber Pendanaan: Studi Kasus pada RS. Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 7(2), pp.94-100.
- Hou Yilin. 2010. The Performance of Performance Based-Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of State. America.
- Iriyadi, I. and Oktafiyanthi, A., 2007. Pengakuan Pendapatan: Studi Komparasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus pada PT. Bank Jabar Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 7(1), pp.19-22.
- Iriyadi and Gurd, B., 1998. Cultural effects of budgetary participation: Indonesian evidence. *Asian Review of Accounting*, 6(2), pp.71-100.
- Khikmah, N.S. dan Edi Priyanto. 2009. Komitmen Organisasi, *Locus of Control*, dan Kompleksitas Tugas Kinerja Auditor Internal. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Konsorsium organisasi Profesi Audit Internal. 2004. Standar Profesi Audit Internal.
- Kusumawati, B. and Fadillah, A., 2014. TINJAUAN ATAS SALURAN DISTRIBUSI PADA PT. SAYAP MAS UTAMA. *Jurnal Online Mahasiswa-Manajemen*, 1(2).
- Mulyadi. 2006. *Auditing*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Pamungkas, B. and Triandi, T., 2007. Telaahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Akuntansi (Menggunakan Microsoft Excel) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Studi kasus pada Rumah Sakit Islam Bogor. *Jurnal Ilmiah Kesatuan (JIK)*, 9(2).
- Professional Practices Framework": *International Standards for The Professional Practice of Internal Audit*, IIA 2009. Risk Based Auditing Konsep.
- Raharja. 2011. Skripsi. Audit Internal terhadap Penerapan *Good Governance*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ratna Amalia. 2013. Skripsi. Pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan dan Pendeteksian fraud. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi universitas Pasundan. Bandung.
- Ratna Indrawatie. 2011. Skripsi. Pengaruh Keahlian Auditor Intern dan Tingkat Kepatuhan terhadap Kinerja Perusahaan. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonimi Universitas Siliwangi.
- Robinson Marc and D. Last. 2009. *A Basic Model of Performance Based Budgeting*. Technical Notes and Manual s. International Monetary Fund. Washington.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*. Diterjemahkan oleh Desi Andriani. Salemba Empat. Jakarta.
- Shah Anwar and Chunli Shen. 2007. *Citizen Centric Performance Budgeting at The Local Level* . Public Sector and Governance Accountability Series.
- Supardi, F., Fadillah, A. and Hakim, L., 2013. Pengaruh Komunitas Pengguna Terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(2).
- Supriadi, Y., 2010. Analisis Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk dan PT. Aneka Tambang, Tbk. *Jurnal Ilmiah Kesatuan (JIK)*, 12(2), pp.35-40.
- Suryani Lilir. 2013. Skripsi. Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT.Dirgantara Indonesia. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
- Tugiman Hiro. 2005. Standar Profesional audit Internal. Penerbit Kanesius. Yogyakarta.
- Tunggal Amin Widjaya. 2004. *Coso-Based Auditing*. Harvarindo, Jakarta.
- William F. Messier. 2006. *Auditing & Assurance Service a Systematic Approach*. The McGraw-Hill Companies. Inc
- Young Richard D. 2003. *Performance Based Budgeting System*. Public Policy and Practice. Institute for Public Service and Policy Research. University of South Carolina.